

HARMEN BATUBARA

Papua Kemiskinan Pembiaran Dan Separatisme



ISBN 978-602-1062-68-5

[www. Wilayahperbatasan.com](http://www.Wilayahperbatasan.com)

Copyright © 2016 by harmen batubara

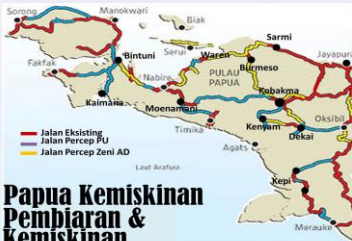
Papua Kemiskinan Pembiaran Dan Separatisme

Papua Kemiskinan Pembiaran Dan Separatisme

Secara umum para pejabat atau Tetua Adat punya pemahaman sederhana terkait perjuangan OPM ini. Secara logika biasa sesungguhnya mudah dimaklumi, kenapa OPM memberontak kepada pemerin tabnya. Jawabnya sederhana, sebab hidup mereka disingkirkan tanpa ada sebuah solusi yang jelas.



Sebenarnya perasaan hati mereka sama. Ketika soal kemanusiaan dijawab secara tidak adil, maka siapapun akan melawan. Sebaliknya kalau diberi perhatian, diberikan kesejahteraan, terjamin sekolah dan kesehatan anak-anaknya, hukum di tegakkan maka bisa dipastikan yang namanya OPM itu sebenarnya tidak akan ada. Jadi, perjuangannya adalah perjuangan hidup- sama seperti kita, agar hidup bisa lebih bermakna. **Harmen Batubara**



Papua Kemiskinan Pembiaran & Kemiskinan

wilayahperbatasan.com



Oleh: Harmen Batubara

Copyright © 2016 by harmen batubara

Wilayahperbatasan.com

Jl Riung Mungpulung Raya No 15 Riung Bandung

Bandung 40295

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang

All Rights Reserved

Sekapur Sirih

Papua menjadi sangat menarik untuk ditulis karena berbagai stigma dan permasalahan yang melekat padanya. Ada suatu masa dahulu, gambaran umum tentang Papua adalah lemahnya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan pemerintah daerah setempat sepertinya punya agenda sendiri dan masih lebih mementingkan kesejahteraan golongan dan diri mereka sendiri. Berbagai alasan yang dikemukakan sebenarnya hanya sekedar mencari alasan dan pengalihan isu dari masih besarnya; korupsi, kkn dan sejenisnya. Sarana dan prasarana memang dibangun tetapi jumlahnya tidak memadai, sudah itu kualitasnya jelek pula. Peyimpangan terjadi dimana-mana, tetapi tetap saja tidak tersentuh UU dan peraturan. Pendek kata semua orang seolah ingin memanfaatkan Papua bagi keuntungan dirinya sendiri.

Papua memang beda, tetapi jelas adalah Indonesia. Memang secara etno biologis penduduk Papua merupakan suku yang memiliki pertalian etnis Melanesia yang mempunyai kaitan dengan suku Melanesia lainnya di Indonesia, dan itu pun punya hubungan dengan suku lainnya di Indonesia. Berada di ujung Timur Indonesia, hidup di tengah keterasingan. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Papua

masih banyak yang berada dalam tarap hidup yang cukup memprihatinkan, seolah-olah mereka tergolong dari para suku pemilik keterisolasian dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Pada saat ini masih ada orang Papua yang berbusana sederhana meski hal itu harus dilihat sebagai simbol tradisi luhur mereka. Mereka sering disebut penduduk primitif, suku dari jaman batu, kaum peramu, penduduk terasing dan masih banyak lagi stigma yang diberikan tetapi sebenarnya semua itu adalah ciri-ciri khas yang menandai betapa sulitnya melakukan pembangunan di papua, karena pola pembangunan yang kita punya hanya dengan model yang sama, tidak bisa membedakan antara pola pembangunan di Jawa, sumatera-kalimantan dan Papua semuanya sama saja. Setidaknya pada masa lalu.

Lemahnya unsur pelayanan Pemda, membuat kita melihat betapa pemerintah daerah dan pusat tersandera oleh “ketidak mampuan” itu sendiri. Tujuan pembangunan yang begitu luhur dan sederhana ternyata “bisa disabot” oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi dan KKN. Hal itu pulalah yang kita lihat dan menjadikan Papua jadi tetap tidak berubah, seperti :

- Papua merupakan salah satu daerah terpencil di ujung timur, memiliki laut dan Pantai, memiliki topografi indah yang alami, memiliki iklim tropis basah serta mempunyai puncak

pegunungannya selalu ditutupi salju abadi. Diselimuti hutan dan hujan tropik basah dan hujan berekologi alpenik.

- Jumlah penduduknya kurang banyak yakni 1 % dari penduduk Indonesia. Mereka bermukim terpencar dan terpencil di lereng-lereng gunung, lembah-lembah serta celah-celah gunung yang sulit di jangkau dari pusat-pusat pelayanan pemerintah.
- Kondisi sosial ekonomi mereka bila dilihat dari kacamata modern masih sangat memprihakan khususnya terkait dengan kondisi perumahan sangat sederhana, hidup dalam honai /owa, pola konsumsi mereka masih tergantung pada alam serta tidak teratur, sebagian besar dari mereka nyaris tanpa busana dengan pola perekonomian subsisten.
- Kondisi sosial masyarakat umumnya masih sederhana, tingkat pendidikan relatif rendah, tingkat kesehatan dan gizi rawan, tingkat penguasaan teknologi rendah.
- Pengembangan perekonomian rakyat di daerah ini umumnya belum bisa berkembang secara alami, karena kurangnya keberpihakan Pemda dan walaupun ada hanya sepotong-sepotong, termasuk diantaranya karena kurangnya infrastruktur perhubungan darat, laut dan

udara; terlebih lagi karena letaknya yang sangat jauh di daerah pedalaman, terisolir dan terpencil.

Di sisi lain, telah banyak didiskusikan bahwa di Papua, tidak saja terdapat dikotomi antara wilayah pantai dan pegunungan, tetapi juga ada pertentangan-pertentangan antar entitas mikrolokal, seperti perang antar suku. Rakyat Papua memiliki tradisi menyelesaikan konflik dengan perang antar suku, apalagi di Papua terdapat 268 bahasa daerah dan 255 suku dengan bahasa masing-masing yang berbeda. Hal ini menyebabkan konflik dan perang antar suku menjadi sebuah realita bagian dari kehidupan itu sendiri; yang sulit dihilangkan karena sudah menjadi bagian hidup keseharian mereka. Namun, menyelesaikan masalah Papua sebenarnya bukanlah sesuatu yang berat hanya saja dia membutuhkan cara khusus dan keberpihakan Pemerintah kepada mereka. Dari pengamatan saya terkait Papua memang ada empat kelompok arus besar yang mempengaruhi pembangunan Papua, saya menggambarannya sebagai berikut¹:

¹ Empat kelompok arus utama ini sesungguhnya dengan sangat mudah diidentifikasi di lapangan, tetapi karena penegakan aturan masih belum berjalan sebagaimana mestinya atau masih penuh dengan berbagai pertimbangan yang selaras dengan kepentingan empat kelompok ini maka jadilah Papua, seperti yang kita kenal.

Pertama: Mereka yang mengambil keuntungan dari kondisi Papua itu sendiri. Maksudnya mereka sama sekali tidak peduli pada pembangunan Papua, yang mereka tahu adalah mengambil keuntungan dari Papua. Mereka bisa datang dari kalangan mana saja, mereka bisa dari golongan pejabat (militer atau sipil), para pengusaha, politisi, tetua adat, kalangan profesional, dan para oportunis. Terkadang kelompok ini saling menjalin kerja sama. Semakin Papua TIDAK BERES maka semakin besar peluang golongan ini memperkaya diri dan golongan mereka sendiri.

Kedua: Mereka Generasi didikan dan antek Belanda, yang menginginkan Papua Merdeka. Mereka adalah bentukan Belanda. Generasi binaan Belanda mulai dari bayi hingga dewasa. Mereka diajari cara makan, istirahat, tidur, dan kerja. Setiap hari mereka sudah bangun sejak jam 5 pagi. Tiap hari mereka juga diberi pekerjaan, berangkat dari rumah hanya pakaian di badan, tapi tiba ditempat sekolah semua sudah disediakan. Handuk untuk mandi sudah ada. Roti dan susu untuk makanan sudah ada. Menurut mereka Belanda bentuk dulu fisiknya, setelah semua itu berjalan dengan baik baru diberikan pelajaran. Belanda bentuk dulu manusianya baru diberi ilmu dan ketrampilan. Menurut mereka Papua sudah disiapkan oleh Belanda dalam suatu persiapan kemerdekaan pada tahun 1961, termasuk didalamnya agreement Roma dan agreement

New York. Mereka merujuk pada Resolusi PBB 2504 yang antara lain mengamanatkan kepada Indonesia diberi izin untuk membangun Papua selama 25 tahun. Setelah masa pembangunan 25 tahun itu selesai. Indonesia berkewajiban menyerahkan Papua kepada PBB untuk melaksanakan referendum atas tanah Papua. Kalau diingatkan bahwa PBB sudah melakukannya pada tahun 1969 dengan nama Pepera. Mereka tidak menerima Pepera, mereka bilang Pepera itu penentuan pendapat rakyat, dan itu menyangkut self determination bukan one people one vote, satu orang satu suara. Mereka tidak mau bahwa itu adalah keputusan Politik. Mereka tidak mau bahwa pada waktu itu pilihan hanya dua. Ikut Belanda atau Ikut Indonesia. Ternyata hasilnya milih ikut Indonesia. Ketika diingatkan bahwa PBB mengakui Pepera adalah referendum. Mereka tetap tidak terima dengan berbagai alasan. Mereka inilah yang membentuk sayap perjuangan bersenjata lewat OPM dan Diplomasi internasional.

Ketiga: Pemerintahan yang tidak melayani; baik pada zaman Orde Baru maupun zaman Reformasi. Kita tahu selama orde baru sepenuhnya pemerintahan dikendalikan oleh militer. Pejabat di jajaran Pemda sepenuhnya diatur oleh pusat lewat jalur militer. Masa-masa inilah masa kelam di Papua, tambang, Kayu, gaharu dll diambil habis dengan berbagai cara, dan

sayangnya rakyat tidak boleh mengambil hasil hutan. Padahal hidup mereka sepenuhnya adalah peramu, rezeki mereka ada di hutan. Mereka melakukan protes tetapi itu tidak bermakna untuk kemudian hilang di telan protesnya. Begitu juga dibidang lainnya, kalau tidak KKN jangan harap bisa jadi apa-apa. Warga Papua pada zaman ini, benar-benar memilih “lari” daripada hidup berurusan dengan pemerintah.

Setelah reformasi hingga Otsus memang ada sedikit perubahan, secara kasat mata semuanya seolah transparan tetapi sesungguhnya pola lama masih saja berjalan. Tetapi jauh lebih halus dan tidak “tertangkap” oleh UU dan peraturan itu sendiri. Setelah Otsus perubahan besar terjadi, militer dan polisi keluar dari pemerintahan tetapi sayangnya Pemda sendiri seperti tidak terkendali. Idealnya di Pemda itu ada semacam pembina dan sekaligus pengawasnya dari Kemdagri. Tetapi ternyata hal seperti itu tidak ada dan memang tidak ada dalam UU. Dana Otsus memang besar tetapi pemakaiannya entah untuk apa sementara Rakyat hanya kebagian sangat sedikit. Korupsi memetamorphose mencari bentuknya sesuai kondisi, dan KKN kian nyata ada.

Keempat : mereka ini adalah generasi Papua baru yang melek pendidikan, bisa berorganisasi, dekat dengan semua pihak, tetapi mereka juga tidak suka Belanda. Mereka percaya bahwa Belanda juga ada maunya, sekali

Belanda tetaplah Belanda yang sebenarnya. Mereka paham bahwa bergabung dengan NKRI jauh realistis dan memang kehendak sejarah, tetapi bukan pemerintahan ala Orde Baru, Bukan juga era zaman Reformasi dan juga bukan zaman Otsus. Mereka ini sedang mencari bentuk dan pemerintahan yang peduli Papua. Menurut saya pemerintahan ala Jokowi-JK.

Pemerintah yang mampu memberikan pembinaan seperti Belanda membina warga Papua pilihan di zaman penjajahan. Pemerintah yang lebih dahulu membentuk karakter jiwa dan hidup Papua sejati baru kemudian diberikan pengetahuan dan ketrampilan. Pemerintahan yang tidak sekedar memberikan kartu sehat dan pintar tetapi lebih dari itu pemerintah yang mampu meng"orangkan" warga Papua tanpa curiga. Warga Papua yang jadi andalan Indonesia di masa datang. Mereka merindukan Pemerintahan yang menjalankan hukum dan aturan secara transparan, adil dan sejahtera dan memihak warga Papua. Pemerintah yang tidak KKN, pemerintahan yang bersih dan berdedikasi.

Semua itu baru akan tercapai kalau semua pihak sudah punya ketetapan hati untuk membangun Papua yang mensejahterakan rakyat.

Harmen Batubara

Kata Pengantar

Papua sejatinya, sungguh indah terlebih lagi kalau kita melihatnya dari danau Sentani yang tenang dikelilingi pegunungan cycloops yang anggun layaknya dilapisi permadani hijau. Pepohonan matoa dan coklat terhampar membentang serasi. Namun dibalik potensi dan kekayaan alam Papua yang demikian indah, tersimpan kondisi yang kontradiksi, di wilayah pedalaman papua, kediaman warga komunitas adat terpencil dan terisolir seperti di Distrik Kemtuk Gresi dan Gresi Selatan.

Saya ingat pada waktu itu Pusat Penyuluhan Sosial pada November 2013 mengunjungi wilayah Distrik tersebut dalam rangka memberikan dukungan terhadap Program Pengembangan SDM Papua yang diselenggarakan oleh Badiklitkesos, untuk turut serta memberikan penguatan motivasi dan optimalisasi peran sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial pada warga masyarakat di Desa Klaisu, Desa Yanim, Desa Braso, Desa Nembu Gresi dan Desa Yansip.

Boleh dikatakan banyak hal yang dilakukan oleh para pihak khususnya pemerintah Pusat dan Pemda untuk kepentingan pembangunan Papua. Tetapi harus kita akui semua itu bagai penggalan-penggalan kegiatan mulia yang tidak terasa manfaatnya. Sama halnya seperti

Universitas Pertahanan yang meneliti semangat bela negara di antara anak muda Papua. Pangdam waktu itu bilang, upaya seperti itu sungguh mulia, tetapi persoalannya di sini masalahnya adalah bagaimana untuk makan hari ini, makan hari besok, hari lusa dst.dst. Tetapi itulah sesungguhnya yang terjadi, para pihak bukan bekerja untuk membangun kesejahteraan Papua, tetapi mereka mencari rezeki sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga mereka pada anggaran yang diperuntukkan untuk Papua. Bahasa ilmiahnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan Papua dengan memanfaatkan agenda dan dari K/L nya masing-masing.

Saya lalu ingat desk perbatasan dan sekarang sudah digantikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP. Kalau sebelumnya ada sebanyak 29 K/L yang ikut mengambil peran dan berpartisipasi untuk pembangunan perbatasan, maka kalau disederhanakan saja kalau masing-masing K/L mendapatkan dana 2 milyar/tahun, maka ada anggaran sebesar 58 milyar yang pasti habis dan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kalau dana sebesar itu di peruntukkan untuk membangun jalan atau jembatan atau untuk membuka lahan karet rakyat untuk Papua, maka sungguh dalam waktu lima tahun warga Papua sudah punya kebun karet rakyat dengan masing-masing dua hektar per orang. Pola pikir itu memang terkesan sederhana dan

salah. Sebab dana-dana itu sudah ada gatukannya. Jadi jelas tidak bisa dipakai sembarangan. Tapi kalau pola pikir kita disederhanakan, aturannya kan bisa diatur. Artinya dananya kan bisa di pusatkan secara terpadu.

Selama ini, keempat kekuatan arus besar itulah yang mewarnai pembangunan di Papua. Isu yang berkembang adalah lemahnya pengelolaan pembangunan di Papua, terlebih lagi di wilayah perbatasan Papua. Pemerintah selama ini hanya menyama rakatan antara perbatasan di Kalimantan-Timor Leste dengan Papua. Padahal semestinya beda, serta mampu mengakomodir hukum adat di dalamnya. Papua punya beragam persoalan sosial yang terus mengemuka, di antaranya masalah tanah ulayat yang dijual oleh para pemuka adat (Ondo Api) tanpa seizin warga. Habisnya lahan sugu warga yang dikonversi dengan kebun sawit. Selain itu, Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus) yang pelaksanaannya belum sebagaimana mestinya. Akibatnya, rakyat Papua masih belum juga keluar dari profilnya sebagai rakyat yang terbelakang, miskin, dan terpinggirkan atau “The people time forgot”. Fakta-fakta itu merupakan ironi rakyat Papua yang tak terbantahkan oleh siapa pun.

Semua permasalahan ini menjadi persoalan pertahanan-keamanan yang harus ditangani secara arif bijaksana oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah

Papua. Apabila persoalan yang hakiki tersebut dapat diuraikan dengan baik, maka diharapkan Pemerintah akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Untuk itulah, maka pada waktu Universitas Pertahanan dirasa perlu melakukan penelitian pertahanan di wilayah perbatasan Papua-PNG, sehingga perlu digali nilai-nilai kebangsaan yang ada di tanah Papua melalui kajian data dan penelitian yang hasilnya bersifat komprehensif, sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan pertahanan di perbatasan Papua, baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun yang bersifat jangka panjang.

Buku ini bisa sampai ke tangan anda setelah melalui berbagai upaya, bantuan dan dorongan dari para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Khususnya sahabat sesama peneliti yang tergabung dalam Center Border Defence Reseach atau CBDR Universitas Pertahanan tahun 2011 seperti Dr La Ode, Dr Sobar Sutisna, Dr Nano Makmur Supriyatno, Kolonel (L) Christine dll, Bekerja sama dengan mereka serasa waktu tiada putusnya. Demikian juga dengan teman-teman dan sahabat di Indah Unggul Bersama dan juga sahabat dilingkungan staf khusus terkait perselisihan perbatasan di Dirjen PUM Kemdagri. Semoga buku yang sederhana ini bisa memberi makna.

Harmen Batubara

Daftar Isi	Halaman
Sekapur Sirih	3
Kata Pengantar	11
Daftar Isi	15
Bab I Pendahuluan	18
1.1 Latar Belakang	18
1.2 Kenapa Buku Ini Saya Tulis?	26
1.3 Untuk Sipa Buku Ini Ditulis?	29
1.4 Ruang Lingkup dan Tata Urut Penulisan	33
BAB II Gambaran Umum Wilayah Papua	35
2.1 Tanah Papua	35
2.2. Kota Jayapura	68
2.3 Kabupaten Keerom	75
2.4 Kabupaten Pegunungan Bintang	96
2.5 Kabupaten Boven Digul	105
2.6 Kabupaten Merauke	114
BAB III Kemiskinan Di Papua	136
3.1 Papua Yang Indah	136
3.2 Budaya Proposal Ala Papua	141
3.3 Budaya Peramu dan Pendulang	145
3.4 Orang Papua menjadi Pendatang Baru di atas Tanahnya Sendiri.	150
3.5 Kebun Karet Rakyat Untuk Warga Miskin Papua	154

3.6 Pemerintah Pusat Dan Pemda Perlu Mengembangkan Karet Rakyat	162
BAB IV Pembiaran Matinya Perubahan	166
4.1 Pembiaran adalah Kejahatan	166
4.2 Ditengarai Korupsi juga seolah dibiarkan meraja lela di Papua benarkah?	170
4.3 Semangat Pembiaran Di Tengah Apparatus?	174
4.4 Hilangnya Sinergitas Pemda-Polri dan TNI	177
4.5 Semangat Pembangunan dan Fakta Pembiaran	179
4.6 Apakah ada hubungannya antara maraknya demonstrasi dengan pembiaran?	183
4.7 Prajurit Penjaga Perbatasan dan Penumpasan OPM	188
4.8 Kesejahteraan Prajurit Perbatasan Rendah	193
BAB V Separatisme Bukan Harga Mati	199
5.1 OPM Belum Tentu Separatisme.	199
5.2 Persepsi Yang Jelek Terhadap Pusat	209
5.3 Perlu Pemahaman Terkait Tertib Sipil di Lingkungan Pemda	217
5.4 Melawan OPM dengan Pembangunan	220
5.5 OPM Takut kepada Hukum Adat	225
5.6 Nicolaas Jouwe, Pejuang Papua Sejati	227
5.7 Diplomasi Kekuatan Militer dan	

Semangat Perebutan Kembali Papua Dari Tangan Belanda Tahun 1960-an	232
5.8 Intelektual OPM yang Berjuang di Luar Negeri	237
BAB VI Penutup	241
6.1 Desentralisasi Asimetris	241
6.2 Grand Design Pembangunan Di Papua	244
6.3 Jadikan Kepala Suku Sebagai Kepala Desa	252
6.4 Membangun Papua dari Lembah Baliem.	256
6.5 Dana Otsus Tidak Tepat Sasaran	259
6.6 Kehadiran UKP4B Semangat Pendampingan	265
6.7 Infrastruktur Jalan Lingkar Papua adalah Kunci	266
6.8 Kebun Karet Rakyat Andalan Warga Papua	269
6.9 Membangun Semangat Kebersamaan Melanesia	274
6.10 Membangun dan Mengkomunikasikan Secara Sinergis	282
Daftar Pustaka	286
Sekilas Tentang Penulis	288